

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peranan sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia karena pendidikan berpengaruh langsung terhadap perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia dan berkaitan langsung dengan pembentukan manusia serta menentukan model manusia yang akan dihasilkannya¹.

Pendidikan formal seperti lembaga pendidikan sekolah akan dirasakan sangat penting, ketika keluarga tidak mampu lagi memberikan pendidikan yang wajar kepada anak anaknya. Lembaga ini akhirnya diterima sebagai wahana proses kemanusiaan dan pemanusiaan kedua setelah keluarga².

Proses belajar mengajar sebenarnya tidak semudah yang kita bayangkan, ini juga menjadi bukti bahwa proses belajar mengajar adalah suatu proses yang kompleks. Proses tersebut terdiri dari banyak bagian yang kait mengait, tiap bagian mempunyai fungsi tersendiri yang bekerja dalam suatu kaitan agar dapat mencapai keberhasilan. Apabila hanya mengandalkan pada salah satu komponen (subsistem) saja, maka siswa tidak akan berhasil mencapai tujuan belajar³.

Pada masa sekarang ini pendidikan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan formal selalu berusaha memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, karena dengan pendidikan yang baik diharapkan akan melahirkan manusia-manusia sebagai generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab.

Sebagaimana dijabarkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tentang sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Bab II Pasal 3,

¹ Nana Syaodih Sukamadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek*, Rosda karya, Bandung , 2000, hlm 38

² Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesioanalisme Tenaga Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm.15.

³ *Ibid*, hlm.61

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa yang sedang membangun, yang berbunyi sebagai berikut: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab⁴.

Dalam merumuskan tujuan pendidikan nasional tersebut di atas, mengandung ciri-ciri pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang mempunyai mutu tinggi. Oleh karena itu, guru merupakan salah satu unsur yang harus berperan secara aktif dalam usaha membentuk sumber daya manusia (SDM) yang potensial dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga yang profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang, dalam arti kata bahwa pada setiap diri guru itu terletak suatu beban dan tanggung jawab untuk membawa para siswanya pada suatu tingkat kedewasaan atau taraf kematangan tertentu⁵.

Guru tidak bisa melaksanakan tujuan pembelajaran tanpa kurikulum karena segala tujuan kurikulum sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan merupakan langkah dan sumbangan ke arah pewujudan. Ini dilakukan melalui berbagai tingkatan pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Seorang guru harus menyadari tujuan itu dan dengan sengaja berusaha untuk mengembangkan dalam mata pelajaran yang di berikan masing-masing.⁶ Dan kurikulum pendidikan di laksanakan secara terbuka sehingga dapat memenuhi kebutuhan maya maupun nyata.⁷

⁴ Undang-undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) 2003, *UU RI No. 20 TH 2003*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 5.

⁵ Ramayulis, *Ilmu pendidikan Islam*, Kalam Mulia, Jakarta, 2006, hlm. 5.

⁶ Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 42.

⁷ Mulyasa, *Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013*, remaja rosda karya, bandung, 2014, hlm. 18.

Secara tradisional kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang di jarkan di sekolah. Definisi ini jelas lebih luas dari pada sekedar meliputi matapelajaran akan tetapi segala usaha sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu kurikulum tidak hanya mengenai situasi di dalam sekolah akan tetapi juga di luar sekolah. Yang jelas ialah bahwa kurikulum bukanlah buku kurikulum, bukanlah sekedar dokumen yang dicetak atau distensil. Untuk mengetahui kurikulum sekolah tidak cukup mempelajari buku kurikulumnya melainkan juga apa yang terjadi di sekolah, dalam kelas, di luar kelas, kegiatan-kegiatan di lapangan olah raga atau di aula, dan sebagainya.⁸

Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan, agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangannya harus di lakukan secara sistematis dan terarah, tidak asal berubah. Perubahan dan pengembangan kurikulum tersebut harus memiliki visi dan arah yang jelas, mau dibawa ke mana sistem pendidikan nasional dengan kurikulum tersebut. Sehubungan dengan itu, sejak wacana perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 di gulirkan, telah muncul berbagai tanggapan dari berbagai kalangan, baik yang pro maupun yang kontra.

Menghadapi berbagai tanggapan tersebut, terutama” nada miring” dari yang kontra terhadap perubahan kurikulum; menteri pendidikan dan kebudayaan muhammad nuh dalam berbagai kesempatan menegaskan perlunya perubahan dan pengembangan kurikulum 2013. Perlunya perubahan kurikulum juga karena adanya beberapa kelemahan yang ditemukan dalam KTSP 2006.⁹

Keberhasilan pengembangan kurikulum sangat ditentukan oleh kebijakan kepala Madrasah dalam mengkoordinasi, menggerakkan, dan menselaraskan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala Madrasah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah

⁸ Nasution *Op. Cit*, hlm. 8-10

⁹ Mulyasa *Op. Cit*, hlm. 59-60

untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu, kepala Madrasah dituntut memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh agar mampu mengambil keputusan dan prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah.

Untuk kepentingan tersebut, kepala Madrasah harus mampu memobilisasi sumber daya sekolah, dalam kaitanya dengan perencanaan dan evaluasi program sekolah, pengembangan kurikulum, pembelajaran, pengelolaan ketenagaan, sarana dan sumber belajar, keuangan, pelayanan siswa, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan dan penciptaan iklim sekolah¹⁰.

Kepala Madrasah sebagai pemimpin, supervisor, dan juga mitra bagi semua guru yang dipimpinnya berpengaruh besar dalam perencanaan, pelaksanaan program-program serta kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan. Pasca pelaksanaan kegiatan pembelajaran kepala sekolah juga berperan sebagai supervisor bagi seluruh kegiatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan betapa cukup besarnya peran kepala sekolah dalam proses pra maupun pasca pembelajaran.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai supervisor, kepala madrasah harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian ini merupakan kontrol agar kegiatan pendidikan di madrasah terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian juga merupakan tindakan preventif untuk mencegah agar para tenaga kependidikan tidak melakukan penyimpangan dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya. keberhasilan kepala madrasah sebagai supervisor antara lain dapat di tunjukan oleh: meningkatnya kinerjanya dan meningkatnya keterampilan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya.¹¹

¹⁰ Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 182.

¹¹ Muwahid Shulhan, *Model Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru*, teras, yogyakarta, 2013, hlm. 53-54.

Melihat begitu penting dan besarnya peranan kepala Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan maka dibutuhkan kesamaan – kesamaan faham, konsep dari keputusan – keputusan yang hendak dijalankan dan dilaksanakan. Dengan adanya kesamaan maka akan lebih mudah untuk mencapai kesefahaman dan terwujudnya kesepakatan bersama sebagai landasan pengambilan keputusan dan persetujuan terhadap sebuah kebijakan atau sebuah program kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.

Begitu sama halnya kasus yang terjadi di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah yaitu kebijakan kepala madrasah yang diharapkan dalam menyelesaikan kasus ini, yaitu masalah yang di alami oleh guru mata pelajaran dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013, dengan kasus yang terjadi di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah kepala madrasah memberi kebijakan kepada dewan guru untuk memakai kurikulum KTSP sebagai bahan penilaian saja dan kurikulum 2013 sebagai media pengajaran sehari-hari

Oleh karena itu saya dalam kesempatan ini mengajukan judul penelitian **“Analisis Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Pengembangan Kurikulum Melalui Supervisi Internal (Studi Kasus di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah, Undaan, Kudus) ”**

B. Fokus Penelitian

Karena luasnya permasalahan yang ada dalam obyek penelitian maka peneliti menfokuskan permasalahan hanya pada Kebijakan Kepala Madrasah Sebagai Supervisor Internal di MI Miftahul Falah Undaan Tengah. Pada penelitian ini peneliti menfokuskan pada ;

1. Kebijakan Kepala Madrasah dalam Pengembangan Kurikulum di MI Miftahul Falah Undaan Tengah.
2. Perencanaan kegiatan Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 di MI Miftahul Falah Undaan Tengah.
3. Pelaksanaan Program Supervisi Internal di MI Miftahul Falah Undaan Tengah.

4. Peran Kepala Madrasah Sebagai Supervisor Internal dalam Mendukung Kinerja Guru Untuk Perkembangan Kurikulum di MI Miftahul Falah Undaan Tengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas ada beberapa hal yang menurut peneliti sangat relevan dan signifikan yang dapat dijadikan permasalahan yaitu :

1. Kebijakan Apa yang di Jadikan Dasar untuk Pengembangan Kurikulum di MI NU Miftahul Falah Undan Tengah?
2. Bagaimana Kebijakan Kepala Madrasah dalam Pengembangan Kurikulum di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah ?
3. Bagaimana Pelaksanaan Supervisi Internal di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah ?
4. Bagaimana Sistem Evaluasi Program Supervisi Internal di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan apa yang di jadikan dasar untuk pengembangan kurikulum di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah.
2. Untuk mengetahui Kebijakan Kepala Madrasah dalam Pengembangan Kurikulum di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah.
3. Untuk mengetahui Pelaksanaan Supervisi Internal di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah.
4. Untuk mengetahui Sistem Evaluasi Program Supervisi Internal di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari setiap penelitian yang dilaksanakan pasti dapat memberi manfaat baik bagi objek atau peneliti khususnya dan juga bagi keseluruhan komponen yang terlibat didalamnya. Manfaat yang dapat diambil dari penulisan proposal ini adalah :

1. Secara Teoretis
 - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan melalui pengembangan kurikulum. Bahwa peran serta seluruh unsur dalam suatu lembaga pendidikan dibutuhkan untuk mewujudkan proses pengembangan kurikulum di sekolah terutama kebijakan kepala madrasah dalam memutuskan baik buruknya.
 - b. Untuk memperkuat teori bahwa Supervisi Internal penting sebagai bahan evaluasi pembelajaran guru dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Secara Praktis
 - a. Dengan kebijakan kepala madrasah dalam mensupervisi pengembangan kurikulum, maka penerapan dan pengembangan pendidikan yang baik dapat terwujud sehingga berimbas pada lembaga pendidikan yang efektif, produktif dan berprestasi serta meningkatkan kualitas peserta didik dalam berprestasi, khususnya di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah, Undaan, Kudus.
 - b. Sebagai bahan munaqosah dan bahan dokumen untuk penelitian lebih lanjut.